

ABSTRAK

RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP PADA ISU KABUT ASAP LINTAS BATAS

Oleh

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Isu kabut asap lintas batas adalah salah satu permasalahan lingkungan yang berulang di kawasan Asia Tenggara dan sebagian besar dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada lingkungan domestik, tetapi juga memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk menangani permasalahan tersebut, negara-negara ASEAN membentuk *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai kerangka kerja sama regional dalam pencegahan dan penanggulangan kabut asap lintas batas. Kemudian Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2014 dan mulai terikat secara resmi sejak 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi literatur terhadap dokumen resmi, laporan lembaga internasional, serta publikasi akademik. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori liberal institusionalisme untuk menjelaskan peran institusi regional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan nasional, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan aktif dalam mekanisme kerja sama ASEAN. Indonesia juga memiliki peran dalam memfasilitasi forum regional seperti Conference of the Parties (COP) AATHP serta menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan juga dinamika kepentingan domestik dalam pengelolaan lahan.

Kata Kunci: Kabut Asap Lintas Batas, AATHP, ASEAN, kerja sama regional, respons Indonesia.

ABSTRACT

INDONESIA'S RESPONSE TO AATHP ON TRANS-BORDER HAZARD ISSUE

By

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Transboundary haze remains a recurring environmental challenge in Southeast Asia, largely driven by forest and land fires in Indonesia. This phenomenon not only affects Indonesia's domestic environment but also significantly impacts air quality, public health, and economic activities in neighboring countries such as Singapore and Malaysia. In response, ASEAN member states established the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) as a regional framework to prevent and mitigate haze pollution. Indonesia ratified the agreement in 2014 and formally became a party in 2015. This study aims to examine Indonesia's response to the AATHP in addressing transboundary haze issues during the 2015–2023 period. Employing a qualitative approach with descriptive-analytical methods, this research draws on literature from official documents, reports by international organizations, and academic publications. The study applies the theory of institutional liberalism to explain the role of regional institutions in facilitating interstate cooperation. The findings indicate that Indonesia's response has been reflected in adjustments to national policies, strengthened institutional coordination, and active participation in ASEAN cooperation mechanisms. Indonesia has also contributed by facilitating regional forums, including the Conference of the Parties (COP) of the AATHP, and by hosting the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Nevertheless, the effectiveness of these measures continues to face structural challenges, particularly in terms of weak law enforcement and the complexity of domestic interests in land management.

Key words: Transboundary haze pollution, AATHP, ASEAN, regional cooperation, Indonesia's response.